

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA WAMENA

Oleh: Telly Nancy Silooy^{*)}

ABSTRACT

Implementation of Aviation Police in Airport in Wamena.

The aim of the research to analyze the implementation of Aviation Policy involving inter-organization relationship, characteristics and capability of implementers, organization resources and environment condition. The research was conducted in Jayawijaya Regency. The Method used was descriptive quantitative method. The method of obtaining the data were questionnaire, interview, documentation and observation. The sample consisted of 52 i.e 60 people. The data were analyzed by using frequency table through scale of likert.

Result of research reveal that implementation of aviation policy in Airport of Wamena does not success well. This is indicated by four independent variables i.e. inter-organization relationship(X1), characteristics and capability of program implementers (X2), organization resources (X3); environment condition(X4) which is 43,33. To obtain the implementation aviation policy in airport wamena of Jayawijaya Regency optimally, the government should try more communication consistency and quality by improving knowledge and technical skill, commitment in performing duty, a good control and loyalty of target groups and increasing facilities and infrastructures.

Key Words : Implementation, Aviation, Policy

Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, perlindungan konsumen, ketentuan internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas penyelenggaraan negara, dan otonomi daerah.

Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan: mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman,

Tujuan penerbangan ini dapat dicapai apabila didukung oleh pembinaan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan.

^{*)} Sekolah Tinggi Ilmu Sosial & Ilmu Politik Amal Ilmiah Wamena Papua

Kebijakan penerbangan ini wajib diterapkan di setiap Bandar Udara di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Bandar Udara Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu daerah di pegunungan tengah yang cukup unik, karena kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah ini sangat tergantung dari fungsi penerbangan. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Lumpuhnya penerbangan akan menyebabkan lumpuhnya kehidupan ekonomi masyarakat karena melalui fungsi transportasi ini sajalah laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat berjalan normal. Dengan demikian sangat diperlukan operasionalisasi penerbangan yang baik dan mendukung. Operasionalisasi penerbangan dapat berjalan dengan baik apabila disesuaikan dengan kebijakan penerbangan yang diberlakukan saat ini yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman. Di sisi lain operasionalisasi penerbangan di Wamena belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan yakni kurang adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan keamanan penerbangan dimana masyarakat selalu melintasi runway yang dapat mengganggu lalu lintas penerbangan, masih kurangnya komunikasi yang terjalin antara instansi yang berwenang dengan berbagai maskapai yang beroperasi di Bandar Udara wamena, kurangnya pengawasan oleh instansi yang bersangkutan dan rendahnya sikap pelaksana kebijakan, selain itu kurangnya sarana dan prasarana serta masih rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bandar udara Wamena.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan “Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penerbangan Di Bandar Udara Wamena ? ”

Tinjauan Pustaka

Kebijakan publik atau dikenal dengan istilah *public policy* seperti dikatakan Thomas Dye dalam Sutopo dan Sugiyanto, 2001 adalah *public policy is whatever government choose to do or not to do*, artinya kebijakan publik adalah apapun pilihan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat lain dari Easton dalam Sutopo dan Sugiyanto(, *public policy is authoritative allocation of values for the whole society* (kebijakan public adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada masyarakat/publik).

Apapun kebijakan yang diambil pemerintah, idealnya adalah untuk kepentingan publik (*public interest*). Kebijakan publik dilihat sebagai suatu sistem terdiri dari input, proses, output dan impact yang merupakan elemen yang tak bisa dipisahkan.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik. Dalam kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Dengan demikian maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekret Presiden (Solichin, 2008 : 64).

Bahkan Udoji dalam Solichin (1981 : 32) dengan tegas mengatakan bahwa : *“the execution of policies is as important if not important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Pada sisi lain, Van Mater dan Van Horn dalam Winarno (1975 : 65) mengatakan bahwa *“policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions”* makna yang bisa ditangkap dari pernyataan itu adalah bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. .

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan tersebut. Namun kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (Solichin, 2008 : 62) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam 2 (dua) kategori, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesfull implementation* (implementasi yang tak berhasil).

Dalam menganalisa implementasi kebijakan penerbangan, penulis menggunakan teori yang disampaikan oleh van Meter dan van Horn.

Teori atau model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008 : 158) mengemukakan bahwa ada enam variabel yang dapat digunakan untuk menganalisis keberhasilan proses implementasi kebijakan, yakni : a).Standar dan sasaran kebijakan. b).Sumberdaya. c).Hubungan antar Organisasi. d).Karakteristik agen pelaksana. e).Disposisi implementor. f).Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Dengan menggunakan perspektif teoritik teori Van Meter dan Van Horn penelitian ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan penerbangan dapat berjalan efektif dan efisien apabila; standar dan sasaran, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi, dilakukan dengan baik

Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk variabel mandiri tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan dengan variabel lain.

Penentuan sampel adalah dengan menggunakan rumus slovin yakni dari 107 pegawai sebagai populasi dengan demikian jumlah sampel adalah 52 orang. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan bantuan tabel frekuensi dengan menggunakan skala likert.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi suatu kebijakan memegang peranan yang sangat penting dalam kebijakan publik, karena suatu kebijakan tidak akan memiliki arti apa-apa jika tidak diimplementasikan. Melalui implementasi kebijakan maka rencana-rencana atau program-program yang masih bersifat abstrak diusahakan perwujudannya menjadi kenyataan. Seperti yang dikemukakan Syauckani, dkk (2002 : 295) bahwa Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Sementara itu Solichin (2008 : 65) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan.

Berdasarkan analisis data diatas maka indikator – indikator tersebut akan dibahas sebagai berikut :

Standar dan Sasaran. Menurut van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007:156), standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

Dalam menganalisa indikator standar dan sasaran, didasarkan pada sub indikator yang terdiri dari pelaksanaan sosialisasi, kejelasan tujuan dan sasaran dan pemahanan tujuan dan sasaran.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata standar dan sasaran dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena adalah 42,33. Dengan demikian menunjukkan bahwa standard dan sasaran dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena masuk dalam kategori kurang baik.

Indikator yang digunakan dalam menjelaskan standard dan sasaran dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena adalah pelaksanaan sosialisasi, kejelasan tujuan dan sasaran dan pemahaman tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Sosialisasi. berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan penerbangan dikategorikan kurang baik. Berdasarkan observasi penulis selama dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan belum diadakan sosialisasi tentang kebijakan tersebut baik di kalangan pegawai maupun masyarakat sehingga menyebabkan ketidak tahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penerbangan yang pada akhirnya menyebabkan kurang taatnya masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan dalam kebijakan penerbangan tersebut.

Kejelasan Tujuan dan Sasaran kebijakan. Analisis data menunjukkan bahwa kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan penerbangan dikategorikan baik. Berdasarkan data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dengan jelas telah menguraikan tentang tujuan dan sasaran penerbangan, yakni : a). mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat; b). memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar

kegiatan perekonomian nasional; c). membina jiwa kedirgantaraan; d). menjunjung kedaulatan negara; e). menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional; f). menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; g). memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; h). meningkatkan ketahanan nasional; dan i). mempererat hubungan antar bangsa.

Tujuan dan Sasaran kebijakan. Dari analisis data menunjukkan bahwa pemahaman tujuan dan sasaran kebijakan penerbangan dikategorikan kurang baik. Artinya bahwa para pegawai yang melaksanakan tugas di Bandar Udara Wamena kurang memahami tentang tujuan dan sasaran kebijakan penerbangan. Hal ini disebabkan karena kurang adanya sosialisasi tentang kebijakan penerbangan. Berdasarkan hasil olahan data ditemukan bahwa 48,07 % responden mengatakan bahwa kebijakan penerbangan kurang disosialisasikan di kalangan pegawai maupun pengguna jasa kebandarudaraan.

Sumber daya. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi atau penerapan suatu kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Dengan demikian dibutuhkan adanya sumberdaya manusia dalam menjalankan tugas-tugas implementasi kebijakan dan dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut.

Dalam menganalisa indikator sumber daya, didasarkan pada sub indikator yang terdiri dari jumlah personil dalam melaksanakan tugas, kemampuan dan kompetensi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas, tingkat pendidikan, pelatihan teknis, ketersediaan sarana dan prasarana dan sumber dana.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata sumber daya dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena adalah 42,67. Analisis data menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena masuk dalam kategori kurang baik. Indikator yang digunakan dalam menjelaskan sumber daya dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena adalah jumlah personil dalam melaksanakan tugas, kemampuan dan kompetensi pelaksana kebijakan dalam

melaksanakan tugas, tingkat pendidikan, pelatihan teknis, ketersediaan sarana dan prasarana dan sumber dana dapat diuraikan sebagai berikut:

Ketersediaan Jumlah Personil Dalam melaksanakan Tugas. Dari analisis data menunjukkan jumlah personil cukup dalam melaksanakan tugas. Hal ini didukung dengan analisis data sekunder yakni jumlah pegawai yang ada di Bandar Udara Wamena sebanyak 107 orang. Apabila dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Bandar Udara Wamena maka jumlah personil yang ada cukup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan di Bandar Udara Wamena.

Kemampuan dan Kompetensi Pelaksana Kebijakan Dalam melaksanakan Tugas.

Dari analisis data menunjukkan bahwa kemampuan dan kompetensi yang dimiliki pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dikategorikan kurang baik. Artinya bahwa kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Bandar Udara Wamena dalam melaksanakan tugas masih kurang baik. Hal ini disebabkan karena kurang adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai dalam menunjang tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai Bandar Udara Wamena mengatakan bahwa kurang adanya pelatihan untuk menunjang SDM, pelatihan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu artinya bahwa pelatihannya tidak merata untuk semua pegawai yang melaksanakan tugas.

Tingkat Pendidikan. Dari analisis data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki pelaksana kebijakan dikategorikan baik. Artinya bahwa tingkat pendidikan pegawai yang ada di Bandar Udara Wamena dinilai baik. Berdasarkan data sekunder menunjukkan bahwa SLTA sebanyak 60 orang sarjana muda sebanyak 32 orang sedangkan strata satu sebanyak 15 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Bandar Udara Wamena cukup menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kebandar udaraan.

Pelatihan Teknis. Dari analisis data menunjukkan bahwa jarang diberikan pelatihan teknis dalam melaksanakan tugas sebanyak 59,62 %. Artinya pegawai yang ada di Bandar Udara Wamena jarang diberikan pelatihan teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai Bandar Udara Wamena, dikatakan bahwa pelatihan teknis yang diikuti oleh pegawai selama ini tidak dilaksanakan secara merata artinya pelatihan teknis hanya diikuti oleh orang-orang tertentu saja.

Disisi lain pelaksanaan tugas dan fungsi di Bandar Udara Wamena membutuhkan tenaga-tenaga teknis yang handal.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana. Dari analisis data menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada kurang memadai. Artinya sarana dan prasarana yang ada di Bandar Udara Wamena kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kebandarudaraan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Bandar Udara Wamena masih sangat minim, seperti gedung yang kurang memadai bila dibandingkan dengan tingkat pengguna jasa kebandarudaraan yang dari tahun ke tahun meningkat, fasilitas-fasilitas pendukung operasional seperti : kendaraan, x-ray dan fasilitas komunikasi yang masih sangat minim.

Hubungan Antar Organisasi. Menurut Winter (Peters B. Guy ad Jon Pierre, 2003 : 207) bahwa salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan adalah perilaku hubungan antar organisasi yakni menyangkut koordinasi dan hubungan kerjasama antar berbagai organisasi maupun antara organisasi dan individu dalam implementasi kebijakan. Hal ini dipertegas oleh Cheema dan Rondinelli dalam Dwiyanto, 2009 ; 163, bahwa kerjasama inter organisasi menunjuk implementasi kebijakan banyak dipengaruhi oleh interaksi dan koordinasi dari banyak jenis dan level yang berbeda dari organisasi pemerintah.

Dalam menganalisa indikator hubungan antar organisasi, didasarkan pada sub indikator yang terdiri dari koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan tugas, koordinasi antar unit/bagian dalam melaksanakan tugas, koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam melaksanakan tugas, komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena adalah 41,63.

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena masuk dalam kategori kurang baik.

Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam melaksanakan Tugas. Dari hasil analisi data menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan tugas dikategorikan kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kurang adanya koordinasi antar instansi terkait dalam implementasi kebijakan penerbangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mengatakan bahwa Bandar udara Wamena jarang melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, padahal seharusnya sebagai instansi vertikal di daerah seharusnya selalu melakukan koordinasi kerja untuk memadukan program kerja di daerah. Hal ini juga dipertegas dengan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa sering terjadi tumpang tindih pelaksanaan program kerja yang di laksanakan di Bandar Udara Wamena, dimana hal ini disebabkan karena kurang adanya koordinasi antara daerah propinsi dan kabupaten dalam penyusunan program kerja atau kebijakan.

Koordinasi Antar Unit/Bagian Dalam melaksanakan Tugas. Dari analisis data menunjukkan bahwa koordinasi antar unit/bagian dalam melaksanakan tugas dikategorikan kurang baik. Artinya bahwa kurang adanya koordinasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sub Bagian Tata usaha mengatakan bahwa kurang adanya koordinasi antar berbagai unit dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena dalam pemberian tugas –tugas rutin pimpinan tidak berkoordinasi kepada pimpinan sub-sub bagiannya, tetapi langsung saja memberikan instruksi kepada bawahannya.

Koordinasi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat Dalam melaksanakan Tugas. Dari analisis data menunjukkan bahwa koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam melaksanakan tugas dikategorikan kurang baik. Artinya dalam pelaksanaan kebijakan penerbangan ini kurang adanya koordinasi antara pihak bandar udara Wamena dengan tokoh-tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 ini, pihak bandar udara tidak melakukan koordinasi dengan kami, jadi kami tidak mengetahui adanya kebijakan penerbangan sehingga bila ada aturan-aturan ketertiban dan keamanan yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, hal tersebut belum disampaikan. Hal ini juga dipertegas dengan hasil pengamatan penulis dimana ketertiban dan keamanan di Bandar Udara Wamena belum kondusif dimana masyarakat masih melewati runway atau lapangan bandar udara yang mengganggu penerbangan.

Komunikasi yang Efektif Antara berbagai pihak yang Terkait Dalam melaksanakan Tugas. Dari analisis data menunjukkan bahwa terjalin komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas dikategorikan kurang baik. Artinya dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin kurang

adanya komunikasi yang efektif antar berbagai pihak yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pimpinan maskapai penerbangan mengatakan bahwa komunikasi antar unit kerja atau maskapai kurang baik, dimana pimpinan dalam mengkomunikasikan suatu informasi tentang aturan, demikian juga dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 tentang penerbangan kurang disosialisasikan atau diinformasikan kepada pihak-pihak yang terkait, baik kepada instansi, pengguna jasa kebandarudaraan dan masyarakat sekitar Bandar udara.

Disposisi Implementor. Menurut Winarno (2007:165), mengatakan bahwa penerapan kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

Dalam menganalisa indikator disposisi implementor, didasarkan pada sub indikator yang terdiri dari konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan, intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan kebijakan, ketaatan dalam pelaksanaan tugas.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa disposisi implementor dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena masuk dalam kategori kurang baik.

Konsistensi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan. Dari analisis data menunjukkan bahwa konsistensi implementor terhadap pelaksanaan kebijakan dikategorikan kurang baik. Artinya pegawai kurang konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. Berdasarkan pengamatan penulis, pegawai jarang ada di tempat, sering bolos/mangkir kerja, pulang tidak tepat waktu dimana seharusnya jam pulang kantor adalah 16.00 wit, tetapi yang terlihat bahwa jam 13.00, keadaan kantor sudah kosong. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kurang adanya konsistensi pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

Intensitas Keterlibatan Dalam Proses pelaksanaan Kebijakan. Dari analisis data menunjukkan bahwa intensitas keterlibatan implementor dalam pelaksanaan kebijakan dikategorikan kurang baik. Artinya keterlibatan pegawai sebagai implementor dalam menjalankan tugas kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pegawai mengatakan bahwa pegawai kurang intens dalam melakukan pekerjaan, hal ini disebabkan karena pimpinan hanya memberikan tugas kepada orang-orang tertentu tanpa berkoordinasi dengan atasan langsung yang membawahi bidang tugas.

Ketaatan Dalam Pelaksanaan Tugas. Dari analisis data menunjukkan bahwa ketaatan implementor dalam pelaksanaan kebijakan dikategorikan kurang baik. Artinya ketaatan pegawai dalam menjalankan tugas yang diemban masih kurang. Berdasarkan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa pegawai kurang taat dalam melaksanakan tugas, dimana hal ini terlihat dari seringnya pegawai yang mangkir dari pekerjaan dan hadir tidak tepat waktu.

Karakteristik Agen Pelaksana. Menurut van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007:163), karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan/program adalah pelaksana (*implementors*). Menurut Merille S. Grindle bahwa keberhasilan implementasi suatu program pemerintah dipengaruhi oleh pelaksana program yakni menyangkut kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menganalisa indikator karakteristik agen pelaksana didasarkan pada sub indikator yang terdiri dari kemampuan lembaga dalam pemberian pelayanan prima, kemudahan dalam layanan administratif, kemudahan dalam layanan bisnis.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena masuk dalam kategori kurang baik.

Kemampuan Lembaga Dalam Pemberian Pelayanan Prima. Dari analisis data menunjukkan bahwa kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima dikategorikan kurang baik

Artinya Bandar Udara Wamena belum mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa kebandarudaraan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa pegawai atau petugas yang melayani masyarakat pengguna jasa sering datang terlambat sehingga menghambat pelayanan, kurang baiknya sanitasi atau lingkungan yang kotor.

Kemudahan dalam Layanan Administratif. Dari analisis data menunjukkan bahwa kemudahan dalam memberikan layanan administratif dikategorikan baik. Artinya dalam memberikan layanan administratif berupa pengurusan yang berhubungan dengan kenaikan pangkat pegawai dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bagian tata usaha mengatakan bahwa pelayanan administratif di Bandar udara dilakukan dengan baik.

Kemudahan dalam Layanan Bisnis. Dari analisis data menunjukkan bahwa kemudahan dalam memberikan layanan bisnis dikategorikan baik. Artinya dalam memberikan layanan bisnis kepada pengguna jasa kebandar udaraan di wamena dilakukan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa banyaknya minat masyarakat untuk melakukan bisnis di Bandar udara wamena berupa banyaknya air line, selain itu adanya kios dan rumah makan yang ada di terminal Bandar udara wamena serta mobil Bandara yang melayani penumpang dari terminal bandara. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Bandar udara wamena memberikan kemudahan dalam layanan bisnis kepada penggunan Bandar udara wamena.

Kondisi Sosisl Politik dan Ekonomi. Menurut van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007:164), mengatakan bahwa kondisi sosial, politik dan ekonomi turut mempengaruhi penerapan suatu kebijakan. Dampak kondisi sosial politik dan ekonomi sangat mempengaruhi hasil-hasil kebijakan dan mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Dalam menganalisa indikator kondisi sosial, politik dan ekonomi didasarkan pada sub indikator yang terdiri dari kepatuhan pengguna jasa Bandar Udara terhadap aturan kebijakan, ketertiban dan keamanan Bandar Udara dalam menunjang kegiatan masyarakat, budaya masyarakat dalam menunjang kegiatan Bandar Udara.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata kondisi sosial politik dan ekonomi dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa kondisi social politik dan ekonomi dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena masuk dalam kategori kurang baik.

Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Dari analisis data menunjukkan bahwa dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dikategorikan tidak baik. Artinya dalam pelaksanaan kebijakan penerbangan ini tidak didukung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat yang masih melintasi area landasan pacu Bandar udara sekalipun pada saat pesawat masih beroperasi. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan keselamatan penerbangan.

Kepatuhan Pengguna Jasa Bandar Udara Terhadap Aturan kebijakan.

Dari analisis data menunjukkan bahwa kepatuhan pengguna jasa Bandar udara terhadap aturan kebijakan dikategorikan kurang baik. Artinya pengguna jasa Bandar Udara kurang patuh terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa masyarakat yang masuk keluar terminal Bandar udara untuk menjajakan barang dagangan tanpa ijin petugas, selain itu kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan seperti buang sampah sembarangan seperti sampah pinang, dan lain sebagainya.

Ketertiban Dan Keamanan Bandar Udara Dalam Menunjang Kegiatan masyarakat. Dari analisis data menunjukkan bahwa ketertiban dan keamanan masyarakat dalam menunjang kegiatan Bandar udara dikategorikan kurang baik. Artinya masyarakat kurang menunjang dalam menjaga ketertiban dan keamanan dan keselamatan penerbangan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa masyarakat setiap saat masih melintasi runway/lapangan Bandar udara sekalipun pada jam-jam sibuknya penerbangan. Selain itu ternak peliharaan masyarakatpun masih dibiarkan berkeliaran di sekitar Bandar Udara yang sangat mengancam ketertiban dan keselamatan penerbangan.

Penutup

Implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena dikategorikan kurang baik yang terindikasikan dari beberapa hal, antara lain

Standar dan sasaran dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena kurang baik. Hal ini tercermin dari kurang baiknya pelaksanaan sosialisasi kebijakan penerbangan, kurang jelas sasaran kebijakan dan kurang adanya pemahaman pegawai dan masyarakat akan tujuan dan sasaran kebijakan penerbangan.

Hal yang sama terjadi pada aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena. Hal ini terbukti dari masih kurangnya kemampuan dan kompetensi yang dimiliki pelaksana kebijakan, tingkat pendidikan yang belum memadai, pelatihan teknis yang masih kurang merata bagi pegawai sekalipun jumlah pegawai di Bandar Udara Wamena cukup tersedia namun kurang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan penerbangan di Bandar Udara wamena.

Hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena dikategorikan kurang baik. Hal ini tercermin dari kurang adanya koordinasi antara instansi terkait, kurang adanya koordinasi antara unit/bagian dalam Bandar Udara Wamena, dan kurang adanya koordinasi antara instansi dengan tokoh-tokoh masyarakat serta komunikasi yang kurang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penerbangan.

Hasil analisis tentang disposisi implementor dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena dikategorikan kurang baik. Hal ini tercermin dari kurang adanya konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan, intensitas keterlibatan pelaksana kebijakan yang masih kurang baik dan kurang didukung dengan ketaatan dalam pelaksanaan tugas.

Karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena dikategorikan kurang baik, yang tercermin dari kurang adanya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima, kurang adanya kemudahan yang diberikan dalam layanan administrative dan kurang adanya kemudahan yang diberikan dalam pelayanan bisnis.

Demikian pula kondisi sosial politik dan ekonomi dalam implementasi kebijakan penerbangan di Bandar Udara Wamena kurang adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, kurang patuhnya pengguna jasa Bandar Udara terhadap aturan yang berlaku, selain itu kurang adanya dukungan ketertiban dan keamanan di Bandar udara Wamena serta budaya masyarakat yang kurang mendukung dalam pelaksanaan operasionalisasi Bandar Udara Wamena.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Peters, B. Guy & Jon Pierre, *American Public Policy: Promise and performance*, Chatham, NJ: Chatam House (Tetjemahan)
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Subarsono, 2008, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

Surachmad Winarno, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Penelitian dan Teknik*, Cetakan ke-Tujuh, Tarsito, Bandung.

Winarno Budi, 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Medpress, Yogyakarta

Widodo, Joko, 2005, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Bayu Media Publishing, Surabaya.

Dokumen Lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Departemen Perhubungan, Jakarta.